

BAB I LATAR BELAKANG

1.1 Latar Belakang

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan aspek krusial dalam dunia industri dan bisnis yang bertujuan untuk melindungi pekerja, perusahaan, dan lingkungan dari potensi risiko yang dapat menimbulkan kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Menurut data dari Organisasi Buruh Internasional (*International Labour Organization/ILO*), setiap tahun terdapat lebih dari 2,3 juta pekerja yang kehilangan nyawa akibat kecelakaan kerja atau penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan. Fakta ini menunjukkan betapa pentingnya penerapan sistem manajemen K3 yang komprehensif dan efektif di setiap perusahaan.

Dalam era globalisasi dan persaingan bisnis yang semakin ketat, penerapan sistem manajemen K3 tidak hanya dilihat sebagai kewajiban hukum, tetapi juga sebagai strategi untuk meningkatkan produktivitas, reputasi, dan daya saing perusahaan. Berbagai standar internasional seperti *ISO 45001:2018* telah mengatur sistem manajemen K3 yang dapat diadopsi oleh perusahaan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat. Selain itu, tantangan dalam penerapan K3 di Indonesia semakin kompleks dengan meningkatnya pembangunan infrastruktur dan industri manufaktur. Faktor-faktor seperti kesadaran yang rendah terhadap pentingnya K3, keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, dan masih banyaknya perusahaan yang belum memprioritaskan K3 menjadi hambatan dalam mewujudkan budaya kerja yang aman.

Pemerintah Indonesia melalui berbagai regulasi, salah satunya UU PERMENAKER No.11 Tahun 2023 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja, telah menetapkan landasan hukum yang kokoh untuk penerapan K3 di seluruh sektor industri. Undang-undang ini menjadi payung hukum pertama yang mengatur tentang keselamatan dan kesehatan kerja di Indonesia, bertujuan untuk memastikan bahwa setiap tenaga kerja terlindungi dari risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur tanggung

jawab perusahaan dalam menyediakan lingkungan kerja yang aman serta memberikan sanksi bagi perusahaan yang lalai dalam melaksanakan kewajiban K3.

Undang-undang telah memberikan panduan dasar, penerapan sistem manajemen K3 yang efektif tidak dapat hanya mengandalkan regulasi semata. Peran aktif dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah, manajemen perusahaan, hingga para pekerja, menjadi kunci dalam mewujudkan budaya kerja yang aman dan sehat. Pemerintah melalui instansi terkait seperti Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan terus mendorong peningkatan kesadaran akan pentingnya K3 melalui berbagai program pelatihan, kampanye keselamatan kerja, serta penegakan hukum yang lebih ketat terhadap pelanggaran K3.

Sementara itu, perusahaan sebagai pelaku utama dalam penerapan K3 harus memiliki komitmen yang kuat dalam menjalankan sistem manajemen K3 secara terpadu dan berkelanjutan. Pengadopsian standar internasional seperti *ISO 45001* yang mengatur tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja menjadi salah satu langkah yang dapat diambil oleh perusahaan untuk memastikan penerapan K3 yang sesuai dengan standar global. Dengan sistem ini, perusahaan tidak hanya dituntut untuk memenuhi regulasi, tetapi juga diharapkan mampu menciptakan budaya kerja yang menjadikan K3 sebagai prioritas utama dalam operasional bisnisnya.

Selain itu, pekerja sebagai subjek utama yang terlibat langsung dalam proses produksi juga memegang peran yang tidak kalah penting. Kesadaran dan partisipasi aktif dari para pekerja dalam menjalankan praktik-praktik K3 yang benar dapat meminimalkan risiko kecelakaan kerja. Oleh sebab itu, pelatihan dan edukasi mengenai pentingnya K3 harus terus digalakkan oleh perusahaan agar setiap pekerja memahami hak dan kewajibannya dalam menjaga keselamatan di tempat kerja.

Meskipun telah ada berbagai upaya dari pemerintah dan industri, tantangan dalam penerapan sistem manajemen K3 yang efektif masih tetap ada. Beberapa di antaranya adalah kurangnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di

bidang K3, keterbatasan anggaran perusahaan untuk investasi dalam infrastruktur K3, serta rendahnya kesadaran di kalangan pekerja tentang pentingnya keselamatan kerja. Kondisi ini menuntut adanya pendekatan yang lebih strategis dalam penerapan K3, tidak hanya dari segi regulasi, tetapi juga dari sisi peningkatan kualitas sumber daya manusia, teknologi, serta budaya keselamatan kerja.

Berdasarkan hasil observasi awal di CV. Prima Nusantara, ditemukan bahwa penerapan K3 di perusahaan ini masih menghadapi berbagai tantangan. Misalnya, meskipun perusahaan telah memiliki kebijakan K3 dan menyediakan alat pelindung diri (APD) untuk karyawan, masih ada beberapa karyawan yang belum menggunakan APD secara konsisten. Selain itu, pelatihan K3 untuk karyawan baru sudah dilakukan, namun belum menjangkau seluruh karyawan di setiap bagian, sehingga tingkat pemahaman mengenai prosedur keselamatan masih minim.

Hasil observasi juga menunjukkan bahwa prosedur tanggap darurat, seperti evakuasi dan penanganan kebakaran, sudah direncanakan, namun pelaksanaan simulasi belum dilakukan secara berkala. Beberapa karyawan masih tampak bingung dengan prosedur evakuasi yang benar, yang menunjukkan bahwa kesiapsiagaan menghadapi situasi darurat perlu ditingkatkan.

Dari temuan ini, dapat disimpulkan bahwa meskipun CV. Prima Nusantara telah berupaya menerapkan K3, pelaksanaannya belum optimal. Banyak aspek yang perlu diperbaiki dan disempurnakan agar tujuan K3 dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat dapat tercapai secara maksimal.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengnalisis bagaimana penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang efektif dapat berkontribusi terhadap peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja di CV. Prima Nusantara. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerapan K3 di lapangan, serta menyajikan rekomendasi yang relevan untuk meningkatkan penerapan K3 di masa depan.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang dapat diidentifikasi masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pekerja bengkel tidak memiliki kesadaran dan pelatihan K3 yang cukup. Mereka sering kali tidak menerima pelatihan formal tentang prosedur keselamatan kerja, sehingga mereka tidak memahami risiko yang ada dan cara menggunakan alat dengan aman.
2. Meskipun tersedia alat pelindung diri (APD), pekerja bengkel sering mengabaikannya karena kurangnya pengawasan, kurangnya pemahaman tentang pentingnya APD, dan persepsi bahwa APD menghambat pekerjaan.
3. Evaluasi keselamatan yang tidak teratur di bengkel seringkali mengabaikan evaluasi periodik penerapan K3 seperti pemeriksaan peralatan dan lingkungan kerja. Karena bahaya yang mungkin tidak teridentifikasi dan ditangani dengan cepat, risiko kecelakaan tetap tinggi.

1.3 Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada tiga aspek utama dalam sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (K3), yaitu penerapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Pembatasan masalah ini bertujuan agar kajian dapat lebih terfokus dan mendalam pada isu-isu spesifik yang berkaitan dengan:

1. Penerapan sistem manajemen K3 fokus pada bagaimana kebijakan K3 diterapkan di lingkungan kerja, termasuk kepatuhan terhadap regulasi, ketersediaan prosedur keselamatan, dan pengadopsian standar K3.
2. Pelaksanaan sistem K3 di lapangan pembahasan mengenai sejauh mana sistem yang telah diterapkan benar-benar dilaksanakan oleh perusahaan dan pekerja. Termasuk bagaimana alat pelindung diri (APD) digunakan, serta pelaksanaan pelatihan dan sosialisasi K3.
3. Evaluasi kinerja K3 penelitian hanya mencakup evaluasi kinerja K3, seperti frekuensi dan efektivitas audit keselamatan, pemantauan risiko, serta tindak lanjut dari hasil evaluasi untuk perbaikan berkelanjutan.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas penerapan sistem manajemen K3 dalam mematuhi regulasi yang berlaku di tempat kerja?
2. Sejauh mana pelaksanaan sistem manajemen K3 berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan?
3. Bagaimana efektivitas evaluasi sistem manajemen K3 dalam mengidentifikasi risiko dan meningkatkan keselamatan kerja?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Efektivitas penerapan Sistem Manajemen K3 dalam mematuhi regulasi keselamatan kerja yang berlaku. Tujuan ini ingin mengetahui sejauh mana kebijakan dan prosedur K3 telah diterapkan sesuai dengan undang-undang dan standar yang ditetapkan.
2. Menilai sejauh mana pelaksanaan Sistem Manajemen K3 diterapkan secara konsisten di lapangan. Penelitian akan mengevaluasi implementasi harian dari kebijakan K3, seperti penggunaan alat pelindung diri (APD), pelatihan keselamatan, dan kepatuhan pekerja terhadap prosedur keselamatan.
3. Mengevaluasi efektivitas proses evaluasi dan audit Sistem Manajemen K3 dalam mengidentifikasi risiko serta meningkatkan keselamatan kerja. Penelitian ini bertujuan untuk memahami seberapa baik evaluasi dan audit sistem K3 berjalan, serta bagaimana tindak lanjut dari hasil evaluasi dapat membantu mengurangi risiko kecelakaan dan meningkatkan keselamatan di tempat kerja.

1.6 Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian di atas, maka hasil penelitian yang diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Manfaat teori

Penelitian ini dapat memperkaya kajian ilmiah terkait penerapan, pelaksanaan, dan evaluasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), serta memberikan kontribusi pada pengembangan teori di bidang K3, terutama dalam konteks regulasi dan praktik di Indonesia.

b. Manfaat praktik

1) Bagi perusahaan

Penelitian ini memberikan wawasan tentang efektivitas penerapan, pelaksanaan, dan evaluasi sistem manajemen K3 di tempat kerja. Hasil penelitian dapat menjadi referensi untuk meningkatkan kinerja keselamatan kerja dan mengurangi risiko kecelakaan di perusahaan.

2) Bagi pekerja

Penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran pekerja akan pentingnya pelaksanaan K3. Dengan demikian, diharapkan kepatuhan terhadap prosedur keselamatan meningkat dan kondisi kerja yang lebih aman tercipta.

3) Bagi regulator dan pengambilan kebijakan

Penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pemerintah dan lembaga terkait dalam merumuskan kebijakan dan regulasi K3 yang lebih efektif, serta memperkuat mekanisme pengawasan dan evaluasi K3 di berbagai sektor industri.